

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN

2026



TIM PENYUSUN

Pengarah

Frista Yorhanita

Penyusun

Ketua : Ermin Nurman

Anggota :

1. Khusnul Khotimah
2. Ririn Ambarwati
3. Mariyatul Qibtiyah
4. Aksa Setia Mukti
5. R. Rizki Andhhitya Yunanto
6. Fransisca Adventa
7. Nurdiansyah

Kontributor :

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Sumberdaya Kelautan
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Triwulan II Tahun 2026 dalam meningkatkan kawasan sentra ekonomi garam, revitalisasi lahan garam, usaha kelautan berkelanjutan serta meningkatkan perizinan berusaha sumber daya kelautan.

Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Direktorat Sumberdaya Kelautan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Juli 2026

Direktur Sumber Daya Kelautan



Frista Yorhanita

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Triwulan II Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses pengukuran dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan terdiri atas 14 indikator kinerja kegiatan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 114,78.

Pada awal tahun 2026 alokasi Direktorat Sumberdaya Kelautan sebesar Rp.1.202.800.000.000 yang terdiri atas 2 komponen yaitu Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Rp.1.201.500.000.000) dan Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Rp.1.300.000.000), namun pada Triwulan II alokasi anggaran menjadi sebesar Rp. 1.135.699.373.000 yang terdiri atas 2 komponen yaitu Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Rp.1.134.782.705.000) dan Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Rp.916.668.000) atau terjadi penurunan anggaran sebesar 68.017.295.000 (5,65%) pada komponen Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan sebesar Rp. 383.332.000 (29,5%) pada komponen Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Sasaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan terdiri atas 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada Triwulan II ini terdapat 4 target capaian indikator kegiatan, yaitu :

1. IKK 2 Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang) dengan target 30 orang dan capaian 40 orang (capaian sebesar 120%).
2. IKK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan target 81% dan capaian 95% sebesar 117,28%;
3. IKK 12 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen) dengan target 2 Dokumen, dan capaian 2 Dokumen (capaian sebesar 100%);
4. IKK 13 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks) dengan target 77 dan capaian 83,3 (capaian sebesar 108,16%)

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan terdapat beberapa tantangan, antara lain: operasionalisasi lahan garam KSIGN, penyelesaian status BMKT ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya), dan minimnya pemahaman pelaku usaha terkait perijinan berusaha. Upaya yang dilakukan dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan antara lain: meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun *stakeholder* dalam mewujudkan target swasembada garam, penyelesaian status BMKT ODCB, serta meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan BMKT.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR GAMBAR.....	III
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	1
1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	2
1.3. ISU STRATEGIS ORGANISASI	3
BAB II. PERENCANAAN	5
2.1. VISI, MISI DAN TUJUAN.....	5
2.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5
2.3. PERENCANAAN KINERJA.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
3.1.1. IKK 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	
.....	12
3.1.2. IKK 2 Luas lahan garam yang direvitalisasi (Hektar)	15
3.1.3 IKK 3 Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	23
3.1.4. IKK 4 Unit Bisnis Biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis).....	27
3.1.5.IKK 5 Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3).....	32
3.1.6.IKK 6 Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)	
.....	37
3.1.7.IKK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	45
3.1.8. IKU 8 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	
(Dokumen)	47
3.1.9. IKU 9 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	
(Indeks).....	49
3.1.10 IKK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	
Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%).....	52
3.1.11. IKK 11 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber	
Daya Kelautan (%)	54
3.1.12. IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya	
Kelautan (Nilai)	56
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	59
BAB IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tahun 2025	10
Tabel 2. Capaian IKK kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan)	12
Tabel 3. Capaian IKK Luas lahan yang direvitalisasi	16
Tabel 4. Rincian kegiatan intensifikasi tambak garam	19
Tabel 5. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (kawasan)	24
Tabel 6. Lokasi pengelolaan BMKT	26
Tabel 7. Capaian IKK Unit Bisnis Biofarmakologi yang Dikembangkan (Unit Bisnis)	28
Tabel 8. Capaian IKK Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta m3)	33
Tabel 9. Capaian IKK Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)	39
Tabel 10. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	46
Tabel 11. Capaian Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	48
Tabel 12. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (indeks)	51
Tabel 13. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan (%)	53
Tabel 14. . Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	55
Tabel 15. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan	2
Gambar 2. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Biru	7
Gambar 3. Nilai Pencapaian Organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan	9
Gambar 4. Lokasi kawasan tambak garam	13
Gambar 5. Dokumentasi Pekerjaan K-SIGN	15
Gambar 6. Lokasi K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao	18
Gambar 7. Pekerjaan Galian dan Timbunan Kolam Peminihan Pond 2, Tanggul Luar Pond & Saluran Drainase Luar Pond dan Tanggul Batas Pond	18
Gambar 8. Pekerjaan% Timbunan Tanah, Pekerjaan LC Jalan Utama, Pekerjaan Bekisting dan Wiremesh, Pengecoran Rigid Beton	18
Gambar 9. Gambar7 Gudang Garam Rakyat	20
Gambar 10. Pekerjaan Long Storage dan Tunnel SWRO	20
Gambar 11. Gudang Garam Nasional dan Gudang Garam Rakyat	20
Gambar 12. Pekerjaan tunnel SWRO dan Long Storage di Kabupaten Cirebon	21
Gambar 13. Gudang Garam Rakyat dan Long Storage di Kabupaten Pati	24
Gambar 14. Geomembran dan Petakan	21
Gambar 15. Pompa Air Laut dan Selang dan Mobile Dryer Plant	22
Gambar 16. Workshop Swasembada Garam di Jakarta	23
Gambar 17. Dokumentasi kegiatan workshop pengembangan pangan fungsional	30
Gambar 18. Sampel produk biofarmakologi	30
Gambar 19. Dokumentasi kegiatan workshop hilirisasi produk biofarmakologi	31
Gambar 20. Dokumentasi kegiatan penyusunan RKT	36
Gambar 21. Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim Pelayanan Berusaha	40

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.

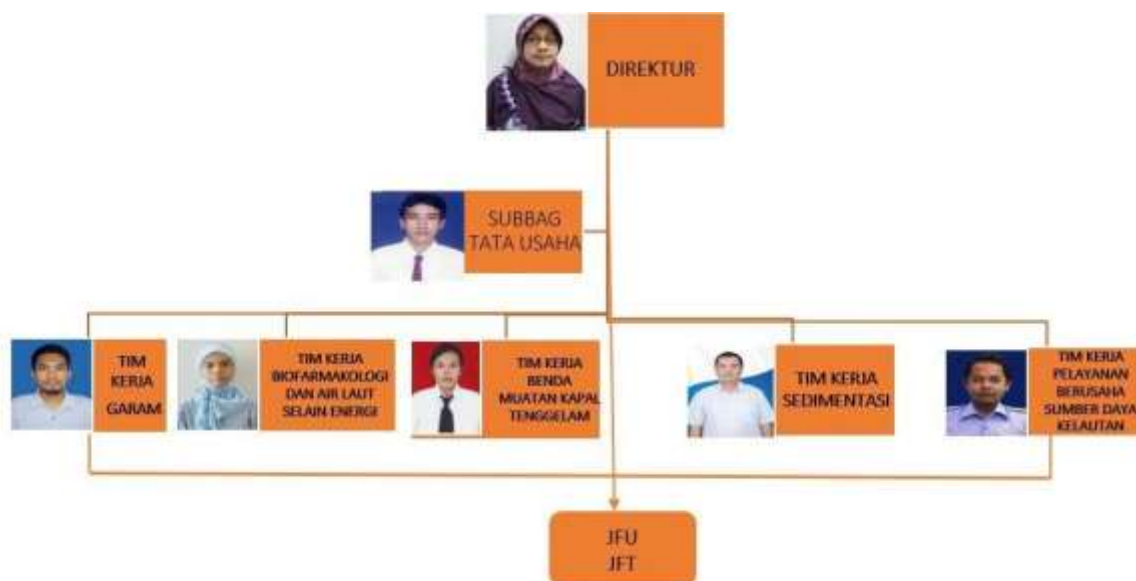
Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut,

- pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sumber Daya Kelautan ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan

Direktorat Sumberdaya Kelautan didukung oleh 52 orang pegawai, yang terdiri dari 20 orang pegawai wanita, dan 32 orang pegawai laki-laki. Berdasarkan status kepegawaianya,

pegawai didominasi oleh ASN sebanyak 32 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 12 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 4 orang dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 4 orang.

Berdasarkan status jabatan fungsionalnya terdapat 2 jabatan fungsional di Direktorat Sumberdaya Kelautan yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) sebanyak 6 orang pegawai dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) sebanyak 26 orang pegawai. Untuk JFT PELP terdiri atas 1 orang ahli madya, 2 orang ahli muda dan 3 orang ahli pertama. Sementara untuk JFT APJK terdiri atas 1 orang ahli utama, 8 orang ahli madya, 11 orang ahli muda, dan 6 orang ahli pertama.

1.3. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis yang menjadi fokus Direktorat Sumberdaya antara lain :

1. Kebutuhan garam dalam negeri yang meningkat setiap tahun. Seperti yang diketahui rata-rata kebutuhan garam nasional berada di kisaran 4,6 – 4,9 juta ton dengan rata-rata importasi diatas 2,6 juta ton atau berkisar lebih dari 50% merupakan hasil impor. Hal ini menunjukkan bahwa produksi garam di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam secara nasional baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Mengingat potensi sumber daya kelautan Indonesia, pengembangan garam di Indonesia masih dapat dioptimalkan. Untuk itu, melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, pemerintah berupaya untuk mencapai target swasembada garam pada tahun 2027. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan intervensi teknologi dalam pembuatan garam;
2. Pemanfaatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dikelola Direktorat Sumberdaya Kelautan merupakan bentuk komitmennya dalam mengelola asset negara yang bernilai ekonomi, budaya dan ekologis. Sesuai Peraturan Presiden No 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BMKT mencakup 2 kegiatan utama yaitu pengangkatan dan pemanfaatan *in situ*. Pengelolaan ini menjadi penting dikarenakan dengan pengelolaan ini diharapkan dapat memperkuat program ekonomi biru;
3. Pemanfaatan biota laut Indonesia berpotensi dikembangkan menjadi sumber bahan bioaktif. Potensi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai sumber daya alam strategis dalam pengembangan biofarmakologi, yaitu pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam bidang farmasi, nutraseutikal, dan kosmetik.

Dengan pemanfaatan biota laut sebagai biofarmakologi diharapkan mampu mendukung program ekonomi biru;

4. Sedimentasi merupakan proses alamiah yang terjadi dimana partikel padat tersuspensi dalam cairan mengendap karena gravitasi sehingga membentuk lapisan sedimen di dasar. Sedimentasi di laut seringkali terjadi akibat kelanjutan erosi yang membawa material kehilangan momentum dan mengendap. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut. Selain itu, pemanfaatan hasil sedimen di laut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sumber daya kelautan tersebut.

BAB II. PERENCANAAN

2.1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi, misi, dan tujuan Direktorat Sumber Daya Kelautan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.

Visi Direktorat Sumber Daya Kelautan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumberdaya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi

biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sistem utama pembangunan nasional

Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor. Ekologi sebagai panglima

2. Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau – pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan;

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjawab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis, sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan dan perikanan Indonesia di pasar global.

4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi

Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan, yaitu:

- a. Tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
- b. Holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
- c. Integratif, melalui sinergi dan integrasi antara proogram dan anggaran lintas sektor; dan
- d. Spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antarwilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya. Empat

pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Empat pendekatan pembangunan ekonomi biru dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Biru

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, maka sasaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Pertama: Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)
2. Sasaran Kegiatan Kedua: Meningkatnya kompetensi petambak garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)
3. Sasaran Kegiatan Ketiga: Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)
4. Sasaran Kegiatan Keempat: Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)

5. Sasaran Kegiatan Kelima: Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m³)
 - b. Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)
 - c. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)
6. Sasaran Kegiatan Keenam : Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)
7. Sasaran Kegiatan Ketujuh : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)
 - b. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)
 - c. Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)
 - d. Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)
 - e. Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)
 - f. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)

2.3. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Sasaran Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2026.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan. Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan disusun pada 26 Januari 2026 dengan anggaran senilai Rp. 1.202.800.000,- dengan 7 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan. Seperti ditampilkan pada Lampiran 1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Direktorat Sumber Daya Kelautan Triwulan II tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Tahun 2026 Triwulan II adalah 114,78 (Istimewa) pada aplikasi kinerjaku. Nilai pencapaian kinerja organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan tahun 2026 ditampilkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Nilai Pencapaian Kinerja Triwulan II Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan 2026.

Tabel 1. Tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan triwulan II tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TW II	CAPAIAN TW II	%
1.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam	1. Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)	-	-	-
2.	Meningkatnya kompetensi petambak garam	2. Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	30	40	120
3.	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	3. Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)	-	-	-
4.	Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam	4. Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)	-	-	-
5.	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan	5. Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m ³)	-	-	-
		6. Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	-	-	-
		7. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	-	-	-
6.	Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan	8. Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)	9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)	81	95	117,28
		10. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)	-	-	-
		11. Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)	-	-	-

		12.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)	2	2	100
		13.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)	77	83,3	108,18
		14.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)	-	-	-

3.1.1. IKK 1 Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)

Korporasi petambak garam yang dikembangkan adalah model pengelolaan usaha garam dimana petambak garam petambak garam tidak lagi bekerja secara individu, tetapi dihimpun dalam satu organisasi usaha bersama—biasanya berbentuk koperasi atau badan usaha—agar lebih kuat dari sisi produksi, pengolahan, hingga pemasaran.

Ciri utama korporasi petambak garam sebagai berikut :

1. Terorganisir;
2. Terintegrasi;
3. Skala lebih besar;
4. Akses lebih luas;
5. Manajemen lebih profesional;

Teknik Menghitung:

Menjumlahkan seluruh kelembagaan korporasi petambak garam yang difasilitasi atau dikembangkan kapasitasnya.

$$\sum KPG = KPG(1) + KPG(2) + \dots KPG(n)$$

$\sum KPG$: Jumlah kelembagaan korporasi petambak garam yang di fasilitasi atau dikembangkan kapasitasnya

$KPG_{(n)}$: Kelembagaan petambak garam yang dibina kapasitas kelembagaannya

Tabel 2. Capaian IKK Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)

SK-1	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam							
IKK - 1	Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW II	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW II	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	-	-	-	-	-	3	18	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Capaian kinerja bersifat tahunan, sehingga belum ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 karena merupakan IKU baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

-

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

F. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Workshop Koperasi Garam

3.1.3. IKK 2 Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)

Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya adalah petambak yang ditingkatkan kemampuannya, pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan dan pendampingan sehingga mampu memproduksi garam sesuai standar cara produksi yang baik.

Teknik Menghitung

Menjumlahkan seluruh petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya secara nasional melalui bimbingan teknis atau sertifikasi di bidang pergaraman.

Tabel 3. Capaian IKK Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)

SK-2	Meningkatnya kompetensi petambak garam							
IKK - 2	Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW II	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW II	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	40 orang	40 orang	120%	30 orang	40%	100	25	160%

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Telah dilaksanakan bimbingan teknis produksi garam dan sertifikasi petambak garam sebanyak 40 orang di Surabaya.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025
Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 karena merupakan IKU baru.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Capaian kinerja triwulan II dibandingkan dengan target renstra DJPK 2025-2029 maka capaian telah tercapai 160%.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
-
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- F. Kegiatan Pendukung
- Bimbingan teknis produksi garam dan sertifikasi petambak garam sebanyak 40 orang di Surabaya
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
- 1) Workshop Koperasi Garam

3.1.3 IKK 3 Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)

Lahan garam yang direvitalisasi adalah lahan garam yang dilakukan perlakuan atau kegiatan langsung maupun tidak langsung agar meningkat produktivitasnya. Perlakuan langsung diantaranya pelapisan geomembrane dan perbaikan lahan (intensifikasi), termasuk pembukaan lahan garam baru (ekstensifikasi). Perlakuan tidak langsung diantaranya perbaikan terhadap saluran air yang mengalirkan air laut sebagai bahan baku pembuatan garam sehingga lahan-lahan garam di sekelilingnya dapat meningkat produksi

garamnya (*long storage*).

Teknik Menghitung

Menjumlahkan luas lahan garam yang dibangun melalui penerapan teknologi evaporasi, pelapisan geomembran, dan pembukaan lahan baru serta luas lahan garam yang memperoleh manfaat akibat dilakukannya perbaikan saluran irigasi (*long storage*).

3.1.3 Tabel 4. Capaian IKK Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)

SK-3	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi							
IKK - 3	Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW II	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW II	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	%Capaian Renstra 2029
616	-	-	-	-	-	1500 Ha	30 Ha	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 karena IKU baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

F. Kegiatan Pendukung

1. Sosialisasi dan koordinasi terkait rencana kegiatan revitalisasi rumah produksi garam di Aceh

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Pengadaan Barang
2. Pembentukan kelompok bagi yang masyarakat
3. Pendampingan kelompok

3.1.4. IKK 4 Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional adalah wilayah yang dikembangkan secara terencana sebagai pusat produksi, pengolahan, dan distribusi garam nasional yang terintegrasi, mulai dari kegiatan hulu (produksi garam rakyat/industri), antara pengolahan dan pemurnian hingga hilir (distribusi dan pemanfaatan industri) guna mendukung swasembada dan kemandirian garam nasional secara ekstensifikasi dan intensifikasi.

Tahapan pembangunan akan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga ujicoba operasional produksi garam. Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk.

Teknik menghitung:

Menjumlahkan kawasan industri garam yang dibangun prasarana dan fasilitas produksi garam

Tabel 5. Capaian IKK Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)

SK-4	Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam							
IKK - 4	Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW II	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW II	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029

1 kawasan	-	-	-	-	-	1 kawasan	1 kawasan	-
--------------	---	---	---	---	---	--------------	--------------	---

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026
Belum ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025
Belum terdapat capaian triwulan II Tahun 2026 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 karena capaian bersifat tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Belum ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 karena capaian bersifat tahunan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- H. Kegiatan Pendukung
1. Penandatanganan kontrak Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun untuk
 2. 4 Juni 2026, melalui nomor kontrak SPK.27/PPK-SDK/PL.450/VI/2026. Dengan nilai investasi mencapai Rp1.018.340.000.000,00, proyek ini akan memperluas lahan produksi seluas 751,27 hektare yang tersebar di tahap kedua
- Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao kini memasuki babak baru, yang ditandai dengan penandatanganan kontrak Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun untuk tahap kedua pada tanggal Desa Lakamola, Desa Serubeba, dan Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur. Eksekusi tahap kedua ini dijadwalkan berlangsung selama 211 hari kalender untuk masa konstruksi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender. Langkah akseleratif ini dirancang untuk segera mewujudkan lumbung garam terbesar dan paling modern di kawasan timur Indonesia.
- I. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
1. Melakukan pembangunan konstruksi Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun

3.1.5. IKK 5 Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m³)

Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola Sedimen di Laut yang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan optimalisasi hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung volume sedimen yang akan dibersihkan melalui pendataan volume pembersihan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 6. Capaian IKK Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m³)

SK-5	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan							
IKK - 5	Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m ³)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW II	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW II	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
850 juta m ³	1000 juta m ³	150 juta m ³	200%	-	200%	500 Juta m ³	800 Juta m ³	125%

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

1. Telah Terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2026 tentang Tim Uji Tuntas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
2. Telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 49

Tahun 2026 tentang Tim Ahli Verifikasi Izin Pemanfaatan Pasir Laut;

3. Telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 50 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tetap (RKT) Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
4. Sejumlah 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Tetap (RKT) dari pelaku usaha pemohon Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) telah dilakukan verifikasi.

Adapun capaian pada poin 1 sd. 3 adalah dasar untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis terhadap Proposal, Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tetap yang diajukan oleh pelaku usaha.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025
Triwulan II Tahun 2026 ini lebih baik dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025. Hal ini terlihat dari capaian dokumen kebijakan yang telah terbit serta pertemuan verifikasi perizinan pasir laut yang dilakukan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 adalah telah terbitnya dokumen kebijakan dan petunjuk teknis sebagai dasar untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis terhadap Proposal, Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tetap yang diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana dan sejumlah 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Tetap (RKT) dari pelaku usaha pemohon Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) telah dilakukan verifikasi sebagaimana telah tercantum dalam huruf A, hal ini belum terlaksana pada tahun 2025.

- D. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan pengelolaan hasil sedimentasi di laut ditentukan oleh sejauh mana proses sedimentasi dapat dikendalikan serta dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang baik ditandai dengan adanya regulasi yang jelas, pemantauan rutin terhadap wilayah pesisir dan laut, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Misalnya, sedimentasi yang dikeruk dapat dimanfaatkan kembali untuk reklamasi pantai, pembangunan infrastruktur pesisir, atau restorasi ekosistem seperti mangrove dan padang lamun, sehingga tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan laut.

Selain itu, keberhasilan juga terlihat dari dampak positif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Jika pengelolaan dilakukan

secara bijak, maka kualitas perairan tetap terjaga, kerusakan habitat laut dapat diminimalkan, dan nelayan lokal tetap bisa menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu. Pendekatan berbasis data dan teknologi, seperti pemetaan sebaran sedimen dan pemodelan arus laut, juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Dengan demikian, pengelolaan hasil sedimentasi tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi dan ekologis.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut adalah kurangnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya penegakan regulasi. Banyak wilayah pesisir yang belum memiliki rencana tata ruang laut yang jelas, sehingga pemanfaatan hasil sedimentasi sering dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sering kali minim, menyebabkan praktik ilegal atau tidak ramah lingkungan tetap berlangsung, yang dapat merusak habitat laut dan memicu konflik kepentingan antar pihak.

Kendala lainnya adalah terbatasnya data dan teknologi yang digunakan dalam proses pengelolaan. Banyak daerah belum memiliki sistem pemantauan sedimen yang memadai, seperti sensor arus dan sedimentasi atau perangkat GIS (*Geographic Information System*) yang akurat. Hal ini membuat perencanaan pengambilan, pemanfaatan, dan pemantauan hasil sedimentasi menjadi tidak optimal. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan ekologis pengelolaan sedimentasi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan dan teknologi.

Untuk mengatasi kendala pengelolaan hasil sedimentasi di laut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai pemanfaatan dan hasil sedimentasi. Pembentukan satuan tugas atau forum koordinasi antarlembaga dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penegakan hukum perlu ditingkatkan dengan memperketat izin operasi, audit lingkungan, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran, agar pelaku usaha lebih disiplin dalam menjalankan aktivitasnya secara ramah lingkungan.

Solusi lainnya adalah peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Investasi dalam sistem pemantauan berbasis teknologi seperti citra satelit, drone, dan sensor laut dapat menyediakan data real-time yang membantu

pengambilan keputusan lebih akurat. Pelatihan bagi aparaturnya pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal juga perlu digencarkan agar mereka memahami pentingnya pengelolaan sedimentasi secara berkelanjutan. Kemitraan dengan institusi riset dan sektor swasta dapat mempercepat inovasi dan adopsi teknologi ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut sangat bergantung pada kemampuan untuk memaksimalkan manfaat sedimen yang dimanfaatkan sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungannya. Banyak program pemanfaatan yang masih berfokus pada pembuangan sedimen tanpa mempertimbangkan potensi pemanfaatannya, seperti untuk reklamasi, penguatan pantai, atau bahan baku konstruksi. Akibatnya, biaya operasional menjadi tinggi karena proses pengangkutan dan pembuangan dilakukan secara terpisah, sementara nilai ekonomi dari sedimen tidak dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi bisa dicapai jika sedimen dikategorikan sejak awal berdasarkan jenis dan kualitasnya, sehingga langsung diarahkan pada pemanfaatan yang sesuai.

Selain itu, efisiensi juga terkait erat dengan pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi kelembagaan. Kurangnya tenaga ahli, minimnya teknologi pemantauan, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi sering kali menyebabkan pengelolaan berjalan tidak efektif dan boros anggaran. Implementasi teknologi seperti GIS dan sistem pemantauan laut seperti Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang bertujuan untuk menerapkan pemanfaatan teknologi digitalisasi sebagai media pelaporan atas kegiatan pengangkutan dan penempatan hasil sedimentasi laut sesuai dengan yang tertuang dalam Permen KP no.33 Tahun 2023 sebagaimana diubah dalam Permen KP no.3 Tahun 2025 dan terakhir dalam Permen KP no.6 Tahun 2026 dan automasi tugas pelayanan perizinan & monev terhadap kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang diamanahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (PP Nomor 26 Tahun 2023). Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya menghemat biaya dan tenaga, tetapi juga memastikan bahwa hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan.

F. Kegiatan Pendukung

- Verifikasi Administrasi Rencana Kerja Tetap PT Rejeki Abadi Lestari (PT RAL)

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2026 di Marine Heritage Gallery, Gedung Mina Bahari IV Lt. 2 KKP, Jakarta dengan dipimpin oleh Katimja Sedimentasi Dit. SDK DJPK dan dihadiri oleh Katimja Hukum dan Advokasi Setditjen PK, Katimja Pelayanan Berusaha SDK, Direktorat SDK, Perwakilan Dit PSDK, Ditjen PSDKP, Perwakilan Biro Hukum, Tim Sedimentasi SDK, Timja Pelayanan Berusaha SDK, dan perwakilan timja lainnya lingkup Dit SDK DJPK. Pembahasan pertemuan ini adalah verifikasi dokumen Rencana Kerja Tetap (RKT) PT. Rejeki Abadi Lestari (RAL). Berdasarkan hasil verifikasi administrasi ditetapkan bahwa PT RAL wajib melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Perlu dilengkapi koordinat lokasi pemanfaatan dalam negeri dan luar negeri;
- b. Perlu dijelaskan terkait volume yang diusulkan dalam dokumen sebesar 99,5 jt m3 sedangkan dalam persetujuan 100 jt m3;
- c. Perlu dilengkapi rincian volume berdasarkan lokasi pemanfaatan volume dalam negeri dan luar negeri;
- d. Perlu menyampaikan perjanjian yang memuat nama kapal dan spesifikasi kapal untuk kegiatan pembersihan;



- Pendampingan Koordinasi dan Survei Lokasi Pembersihan Sedimentasi di Laut Pascabencana di Provinsi Aceh

Pertemuan dan survei dilaksanakan di Provinsi Aceh tanggal 5-8 Mei 2026. Beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan dan survei sebagai berikut:

- a. Banjir yang terjadi di Provinsi Aceh menimbulkan dampak sedimentasi di laut pada sejumlah lokasi pelabuhan perikanan, antara lain PPS Lampulo, Pelabuhan Lambada, serta pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.
- b. Diperlukan penanganan lebih lanjut terhadap hasil sedimentasi di laut pada lokasi-lokasi terdampak sesuai arahan Gubernur Aceh, guna memulihkan

fungsi pelabuhan perikanan yang terdampak.

- c. Perlu koordinasi berkelanjutan antara Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh serta Pemerintah Provinsi Aceh dalam merumuskan langkah penanganan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut pascabencana.
- d. Hasil survei lapangan pada lokasi-lokasi terdampak akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut di Provinsi Aceh.



- Pembahasan Lanjutan Metode Survei dan Pengambilan Sampel Sedimen di Laut
Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2026 di kantor KKP di Jakarta dengan dipimpin oleh Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan dihadiri oleh Direktur SDK, perwakilan Lembaga Surveyor dari Sucofindo dan Surveyor Indonesia, perwakilan para pelaku usaha dredger serta perwakilan Tim Kerja Sedimentasi dan Tim Kerja Pelayanan Berusaha SDK. Hal-hal yang berkembang dalam rapat sebagai berikut:
 - a. Spesifikasi Teknis material hasil sedimentasi di laut telah diatur dalam Kepmen KP Nomor 47 Tahun 2024 dan peraturan untuk survei eksplorasi sudah diatur dalam Kepdirjen PKRL no 9 Tahun 2025;
 - b. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menemukan *best practices* dari pengalaman pelaku usaha dan Lembaga Survei sebagai bahan untuk perbaikan tata Kelola pemanfaatan hasil sedimentasi di laut
 - c. Diskusi:
 - Sampel yang diambil dalam kedalaman tertentu jika hasilnya homogen, maka dapat diambil di mana saja dan bisa hanya 1 sampel. Jika tidak homogen, maka harus ada beberapa sampel yang diambil;
 - Pertemuan selanjutnya untuk mendiskusikan bagaimana melakukan pengujian di atas kapal;

- Perlu didiskusikan lebih lanjut konsekuensi jika ada barang Lartas yang diambil sampelnya tidak sesuai aturan;

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah KKP akan mengirimkan surat resmi untuk meminta masukan tertulis dari pelaku usaha dredger dan Lembaga Survei untuk substansi bahan masukan perbaikan khususnya beberapa hal yang menjadi dasar pengambilan sampel dan uji yang belum termuat di Kepdirjen PKRL 9 tahun 2025.



- Pertemuan dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Kelautan dengan dihadiri oleh Bupati Bangka Tengah beserta Kadis KP dan Kadis LH dan Tim, Katimja Sedimentasi dan Tim, Katimja Pelayanan Berusaha SDK dan Tim, perwakilan Dit. PRP3K Ditjen PRL Hal-hal yang berkembang dalam rapat sebagai berikut:

- a. Ada beberapa lokasi di Kab. Bangka Tengah yang masuk ke dalam Kepmen KP no 13 Tahun 2026 sbb:
 - Rencana Pelabuhan Koba (Kepmen KP 13/2026 Hal 557)
 - Muara Sungai Berok (Kepmen KP 13/2026 Hal 557)
 - Muara Kulur Ilir (Kepmen KP 13/2026 Hal 559)
 - Muara Sungai Kurau (Kepmen KP 13/2026 Hal 560)

Diutamakan lokasi di Muara Sungai Kurau dikarenakan banyaknya sedimen yang menyebabkan banjir dan menghalangi alur kapal yang akan menyeberang ke pulau sebelahnya yang merupakan wilayah pariwisata Kab. Bangka Tengah.

- b. Di beberapa lokasi di laut Kab. Bangka Tengah terdapat timah, hal ini seperti barang mineral lain perlu dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM.
- c. Jika sesuai dengan Kepmen KP no 13 Tahun 2026, maka perizinannya ada di KKP.
- d. Beberapa hal yang diusulkan oleh Kab. Bangka Tengah untuk Sinergi

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- Perlunya penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - Bangka Tengah memiliki wilayah pesisir dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
 - Diperlukan tata kelola sedimentasi laut yang berkelanjutan
- e. Selama sedimen masih ada, maka lokasi yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan akan tetap dimunculkan untuk tujuan dibersihkan.



H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL) yang masuk;
2. Melakukan Pembahasan lanjutan Modul Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
3. Melakukan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Pasir Laut.

3.1.6. IKK 6 Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/ atau ekonomi yang berada di dasar laut yang perlu dipelajari agar kita dapat memahami dan belajar tentang masa lampau mengenai jalur pelayaran, perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kapal dan kenavigasian serta kebudayaan masyarakat di masa lampau sebagai salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan lokasi atau titik koordinat bangkai kapal tenggelam dan/atau benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan BMKT untuk dikelola secara baik. Setelah kawasan atau lokasi BMKT teridentifikasi, dilakukan penilaian komprehensif untuk menentukan strategi kebijakan pengelolaan terbaik dan secara berkelanjutan.

Kawasan BMKT yang dikelola secara spesifik merujuk pada lokasi atau titik koordinat ditemukannya bangkai kapal maupun muatannya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Identifikasi titik-titik koordinat ini memastikan bahwa setiap temuan berada dalam pengawasan yang tepat. Dengan identifikasi dan pemetaan yang akurat, aset-aset bawah air tersebut dapat diarahkan menjadi sumber daya kelautan yang dikelola secara baik demi kepentingan negara maupun kesejahteraan masyarakat luas.

Setelah kawasan atau lokasi BMKT berhasil teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian komprehensif untuk mencari potensi yang ada di dalamnya. Penilaian mendalam ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan pemanfaatan BMKT secara insitu maupun . Melalui proses evaluasi yang matang, kebijakan yang diambil diharapkan dapat menjamin pengelolaan BMKT yang efisien dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi bangsa dan negara.

Teknik Menghitung:

Jumlah kawasan BMKT yang dilakukan identifikasi melalui survei dan penilaian potensi pemanfaatan BMKT

Tabel 7. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)

SK-5	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan	
IKK - 6	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	
Tahun 2025	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029

Capaian 2025	Capaian TW II	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW II	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
1 kawasan	-	-	-	-	-	1 Kawasan	3 kawasan	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026
Capaian indikator kinerja kegiatan Kawasan BMKT yang dikelola pada Triwulan II tahun 2026 belum ada capaian karena capaian bersifat tahunan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Triwulan II Tahun 2025 masih sama, yaitu belum ada capaian.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kawasan BMKT yang dikelola Triwulan II Tahun 2026 terhadap Capaian Renstra DJPK Tahun 2029 tidak dapat dibandingkan.

- D. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan BMKT Adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Kendala lainnya adalah kurang sinkronnya regulasi dan hambatan implementasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan BMKT.

Untuk mengatasi kendala pengelolaan BMKT, langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi dan koordinasi lintas sektor. Solusi lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, menjalin kemitraan dengan institusi riset dan sektor swasta.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- J. Kegiatan Pendukung
- a) Serah Terima BMKT berupa fragmen / keramik kepada Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia

Pada Triwulan II Tahun 2026, Direktorat Sumber Daya Kelautan melaksanakan kegiatan serah terima fragmen Benda Muatan Kapal Tenggelay (BMKT) kepada Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Fragmen yang diserahkan merupakan pecahan BMKT yang tidak termanfaatkan, tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), serta tidak memiliki nilai sejarah maupun nilai ekonomi. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) keping fragmen berasal dari lokasi pengangkatan Karawang, Belitung Timur, Karang Heluputan, dan Pulau Buaya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan fragmen BMKT melalui pendekatan seni, sehingga memberikan nilai tambah dari aspek edukasi, budaya, dan ekonomi kreatif. Melalui hibah tersebut, ISI Yogyakarta akan menyusun rencana konservasi dan pemanfaatan fragmen BMKT yang tersimpan di Gudang BMKT Cileungsi. Hasil konservasi diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk souvenir untuk kegiatan kenegaraan serta menjadi bagian dari karya seni instalasi yang dapat dipamerkan di Marine Heritage Gallery maupun lokasi potensial lainnya.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyelenggaraan kuliah umum bertema "Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelay: Potensi Sumber Daya Kelautan" yang dihadiri oleh Rektor ISI Yogyakarta, Dr. Irwandi, S.Sn., M.Sn., dan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Muhamad Sholahuddin, S.Sn., M.T.

Pelaksanaan hibah dan kuliah umum tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan BMKT yang berkelanjutan melalui kolaborasi di bidang seni, pendidikan, dan pelestarian warisan budaya maritim.



b). Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Pengelola BMKT di Pulau Untung

Jawa

Dalam rangka mendukung pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang berkelanjutan, Direktorat Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan kegiatan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas bagi kelompok masyarakat pengelola BMKT di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai strategis BMKT serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata bahari berbasis warisan budaya bawah air.

Materi yang disampaikan meliputi pengembangan dan pemanfaatan potensi BMKT, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, serta pelatihan teknik fotografi, videografi, dan strategi publikasi digital. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai peran masyarakat dalam menjaga kelestarian situs BMKT melalui pengawasan, pelaporan temuan, pengembangan wisata bahari, serta pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis masyarakat.

Selain itu, peserta mendapatkan pelatihan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi wisata dan BMKT, yang mencakup strategi penyusunan konten digital, pemanfaatan platform media sosial, teknik pembuatan video singkat, penyusunan caption, penggunaan hashtag, serta pengenalan aplikasi pendukung untuk penyuntingan konten. Materi tersebut diarahkan agar masyarakat mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi destinasi wisata bahari dan edukasi mengenai warisan budaya maritim.

Kegiatan juga dilengkapi dengan pelatihan teknik fotografi dan videografi menggunakan telepon seluler, meliputi teknik pencahayaan, komposisi, sudut pengambilan gambar, serta teknik stabilisasi video. Setelah penyampaian materi, peserta mengikuti praktik lapangan dengan menghasilkan foto dan video pendek yang kemudian dipublikasikan melalui media sosial sesuai karakteristik kelompok masing-masing, sebagai bentuk implementasi langsung atas materi yang telah diberikan.

Pelaksanaan kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelestarian dan pemanfaatan BMKT sebagai warisan budaya maritim yang memiliki nilai sejarah, edukasi, sosial, dan ekonomi. Selain itu, peserta memperoleh keterampilan dasar dalam memproduksi serta mempublikasikan konten digital untuk mendukung promosi Pulau Untung Jawa sebagai destinasi wisata bahari berbasis warisan budaya bawah air. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendukung pengembangan konsep Marine Eco-Archaeological Park di wilayah Kepulauan Seribu melalui keterlibatan

aktif masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Sumber Daya Kelautan akan melaksanakan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok masyarakat pengelola BMKT, termasuk pemantauan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Selain itu, akan diupayakan pengembangan kapasitas masyarakat melalui pembentukan kelompok pemandu wisata bahari, replikasi kegiatan serupa di lokasi lain yang memiliki potensi BMKT, serta penyusunan materi edukasi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung diseminasi informasi mengenai pelestarian dan pemanfaatan BMKT secara lebih luas.



- c) Rapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Rapat dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan pembahasan trilateral antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kebudayaan,

dan BRIN. Perubahan regulasi diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas tata kelola pengangkatan BMKT, serta mengoptimalkan mekanisme pemanfaatan BMKT melalui penyempurnaan materi muatan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023.

Salah satu substansi utama yang dibahas adalah penyisipan Pasal 5A yang mengatur mekanisme verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagai tahapan yang harus dilalui sebelum pelaksanaan pengangkatan BMKT. Dalam pembahasan tersebut disepakati bahwa proses verifikasi menjadi bagian penting dalam memastikan kelayakan rencana pengangkatan BMKT, dengan melibatkan kementerian/lembaga sesuai kewenangannya. Selain itu, rapat juga membahas kebutuhan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi, ruang lingkup dokumen teknis, pelibatan instansi terkait, serta penyelarasan pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian cagar budaya, perizinan berusaha, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Hasil rapat menyepakati bahwa rancangan perubahan Peraturan Presiden telah mengakomodasi berbagai masukan dari kementerian/lembaga dan selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan naskah sebelum memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum. Penyelesaian perubahan regulasi ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas tata kelola pengelolaan BMKT melalui mekanisme pengangkatan, pemanfaatan, dan pelestarian yang lebih terintegrasi. Draft RPerpres Nomor 8 Tahun 2023 telah selesai mendapatkan masukan dan akan dilakukan perbaikan serta masuk ke proses harmonisasi di Kementerian Hukum.

K. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

a) Konsultasi Publik dengan Pelaku Usaha terhadap Revisi Perpres 8 Tahun 2023



tentang Pengelolaan BMKT.

b) Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan

Kapal Tenggelam.

- c) Kerjasama dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Dukungan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d) Kerjasama dengan RRT dan Australia.

3.1.7. IKK 7 Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Wilayah perairan Indonesia yang tergolong dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*) menjadi habitat bagi ribuan spesies biota laut, mulai dari mikroorganisme, invertebrata, hingga flora dan fauna laut yang memiliki potensi besar sebagai sumber bahan bioaktif.

Potensi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai sumber daya alam strategis dalam pengembangan biofarmakologi, yaitu pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam bidang farmasi, nutrasetikal, dan kosmetik. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa senyawa yang dihasilkan dari spons laut, alga, bakteri laut, dan biota lainnya memiliki aktivitas antibakteri, antivirus, antikanker, antiinflamasi, dan imunomodulator.

Pasar ekspor produk kelautan cukup besar yang ditunjang dengan potensi sumber daya hayati yang cukup melimpah. Hal ini dapat mendukung industri biofarmakologi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan, mulai dari pangan alternatif, kosmetik, suplemen, obat, hingga rekayasa energi ramah lingkungan untuk biofuel. Selama ini Indonesia lebih banyak mengeksport produk biofarmakologi dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi dan mengimpornya kembali ketika sudah menjadi barang jadi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produk biofarmakologi antara lain standarisasi bahan baku belum dikuasai oleh sebagian UMKM, bahan baku dari laut relatif lebih mahal dibanding dengan terestrial, keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk, akses permodalan, dan banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin edar sehingga pasarnya terbatas.

Dalam konteks kelautan, biofarmakologi berfokus pada organisme laut sebagai sumber senyawa bioaktif. Organisme laut, seperti alga, spons, bakteri laut, teripang, karang lunak, dan plankton, menghasilkan berbagai molekul kimia unik untuk bertahan hidup. Molekul inilah yang disebut senyawa bioaktif laut, senyawa yang memiliki kemampuan biologis tertentu, misalnya menghambat bakteri, meredakan radang, membunuh sel kanker, atau melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif.

Biofarmakologi adalah pemanfaatan biota baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme yang ada di laut atau perairan umum, termasuk biota air laut, air

payau, dan air tawar sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan menjadi obat, suplemen kesehatan, kosmetik, atau bahan industri medis. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan dilakukan melalui pemetaan potensi calon lokasi pengembangan unit bisnis biofarmakologi.

Teknik Menghitung:

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan potensi untuk pengembangan unit bisnis biofarmakologi

Tabel 8. Capaian IKK Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)

SK-5	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan							
IKK - 7	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW II	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW II	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
1	-	-	-	-	-	1 unit bisnis	2 unit bisnis	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Belum ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 dikarenakan capaian bersifat tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan

Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan Informasi Geospasial (IG) Biofarmakologi.

Kendala ‘

Keterbatasan anggaran untuk mengumpulkan data primer IG Pelaku Usaha Biofarmakologi sehingga harus mengandalkan data sekunder.

Solusi

Menunggu anggaran tambahan dari PNBPN agar target dapat tercapai.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;

- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti dinas perikanan dan media online.

G. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKK Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis) yang telah dilaksanakan pada Triwulan II, antara lain:

1. Verifikasi Data untuk Penyusunan Informasi Geospasial Biofarmakologi

Penyusunan Informasi Geospasial Biofarmakologi melalui pemetaan pelaku usaha yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan untuk bahan baku obat, suplemen, kosmetik, maupun pangan fungsional. Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain lokasi usaha, lokasi bahan baku, lokasi pemasaran, jenis bahan baku, produk yang dihasilkan, jumlah tenaga kerja, metode pemasaran, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7-9 April 2026 di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Lokasi pertama yang dituju adalah GDM Natural Beauty yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi produk perawatan wajah dan tubuh antara lain: krim rumput laut, body wash, sunscreen, healing balm, moisturizer, facial wash, milk cleanser, lip balm, toner, serum, collagen seaweed. Mereka juga membuka salon khusus muslimah menggunakan produk yang dihasilkan sendiri. Bahan baku yang digunakan adalah rumput laut merah yang berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara. Metode pemasaran menggunakan sistem online melalui marketplace, affiliate, reseller, dan grup pertemanan. Perusahaan memulai usahanya melalui sistem maklon karena keterbatasan peralatan produksi. Seiring berjalannya waktu, mereka mampu memproduksi barang sendiri dengan mempelajari berbagai literatur dan jurnal penelitian.

Lokasi kedua yang dikunjungi adalah PT. Rumah Rumput Laut yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi produk perawatan wajah dan tubuh berbahan baku rumput laut dengan merek "Wedlyn" antara lain krim wajah, hand body lotion, lip balm, masker wajah yang semuanya sudah bersertifikat BPOM. Pemasaran Wedlyn merupakan brand di bawah Rumah Rumput Laut (RRL) yang mulai beroperasi sejak tahun 2018. Usaha ini berawal dari kegiatan penelitian yang dilakukan bersama oleh dosen IPB. Penelitian awal didukung oleh pendanaan dari Ristekdikti melalui program inkubasi bisnis dari Science Techno Park (STP) IPB.



2. Mengikuti *National Policy Dialogue* “Kedaulatan Maritim Berbasis Biodiversitas: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia”

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan *National Policy Dialogue* sebagai forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan nasional yang terintegrasi. Acara ini berlangsung tanggal 22 Mei 2026 bertempat di Balai Senat Kantor Pusat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Acara dibuka oleh Rektor UGM. Narasumber/pembicara pada kegiatan ini antara lain: Megawati Soekarnoputri, Prof. Rokhmin Dahuri, Prof. Budi Setiadi Daryono, Dr. Andes Hamuraby Rozak, Arif Havas Oegroseno, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio. Selain narasumber, hadir pula para pembahas yaitu unsur dari K/L

terkait, akademisi, peneliti BRIN, asosiasi, dan pelaku usaha.

Direktur Sumber Daya Kelautan yang diwakili oleh APJK Utama hadir sebagai pembahas dengan topik bahasan Kekayaan Hayati Kelautan Nasional. Beberapa hal yang disampaikan selaku pembahas antara lain: ada sumber biodiversity utk biofarmakologi dan energi baru terbarukan dari laut, mohon KKP bisa diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan, regulasi, kerangka pendanaan, dan kerangka kelembagaan, perlu merumuskan penataan alokasi ruang untuk sustainability sumber daya genetik, spesies, dan ekosistemnya. Pengendalian melalui perizinan pemanfaatan jenis perlu dilakukan agar tidak over eksploitasi.



H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- a) Verifikasi data untuk penyusunan Informasi Geospasial Biofarmakologi
- b) Audiensi terkait pemetaan sumber daya kelautan guna mendukung pengembangan biofuel

3.1.8 IKK 8 Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannyaberdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha berbasis risiko memiliki tarif PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Sumber Daya Kelautan (PNBP SDK) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Kegiatan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL), Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Izin Produksi Garam, Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut.

Teknik Menghitung:

% Penyelesaian Perizinan: $\frac{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi}}{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA}} \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi: Total permohonan yang dilakukan verifikasi/pembahasan muatan dokumen perizinannya.
- Jumlah permohonan perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA : Total Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS atau PTSA KKP

Tabel 9. Capaian IKK Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)

SK-6	Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan							
IKK - 8	Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 2	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 2	Target TW 2	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2026 disebabkan target capaiannya Tahunan

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2026 belum ada disebabkan target capainnya tahunan
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 belum ada disebabkan target capainnya tahunan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)
Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2026

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh asistensi dan audiensi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta percepatan proses perizinan oleh pelaku usaha. Kendala teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU antara lain belum optimalnya kepastian pelaku usaha dalam mengajukan dan menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan berusaha. Solusi/Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya meningkatkan intensitas asistensi, audiensi dan pendampingan secara terukur kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan berusaha baik melalui *hotline* dan asistensi secara daring dan luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga keberhasilan pencapaian output sesuai dengan perencanaan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

F. Kegiatan Pendukung

- 1) Melakukan asistensi dan audiensi kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan;
- 2) Melakukan verifikasi perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
- 3) Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha perizinan berusaha lingkup

Direktorat Sumber Daya Kelautan



Kegiatan Pendukung pelayanan berusaha periode TW II T.A 2026

G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

- 1) Melakukan asistensi dan audiensi lebih intensif kepada pelaku usaha
- 2) Melakukan pendampingan tim pengawas sumber daya kelautan dalam melaksanakan monitoring terhadap izin yang sudah terbit

3.1.9. IKK 9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Teknik Menghitung:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan

- A : Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan
- B : Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Sumber Daya Kelautan

Tabel 10. Capaian IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW II	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW II	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
95,2%	95,24%	0,04%	117,28	81%	100%	81%	84%	117,58%

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 95,24%. Capaian ini dihasilkan dari Penyelesaian Rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Target IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%) pada Triwulan II 2026 sebesar 81% sedangkan capaiannya sebesar 95,24%, sehingga capaian kinerja sebenarnya sebesar 117,28%.

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 95,24%. Capaian triwulan II 2026 terjadi penurunan dibandingkan capaian triwulan II 2025.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Target IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. SDK (%) pada Triwulan II Tahun 2026 ditetapkan sebesar 81%. Capaian pada periode TW II 2026 sebesar 117,58%

D. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan capaian kinerja ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja Direktorat

Sumber Daya Kelautan dalam menindaklanjuti pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP. Belum ditemukan kendala pada periode Triwulan II 2026. Solusi yang akan dilakukan jika menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi ke masing-masing koordinator lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan Itjen KKP.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan SDM yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti hasil temuan LHP Itjen.
- G. Kegiatan Pendukung
 - 1. Rapat penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Periode April - Juni 2026.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
 - Penyelesaian Sisa Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK

3.1.10. IKK 10 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern

Teknik Menghitung:

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

- X penyelesaian : Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
- A : Jumlah nilai tindaklanjut temuan BPK

B : Jumlah nilai temuan BPK

Tabel 11. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 10	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit SDK (%)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 2	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 2	Target TW 2	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
100	-	-	-	-	-	100%	100%	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026
Capaian kinerja IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup SDK belum ada capaian disebabkan bersifat tahunan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025
Capaian Kinerja belum dapat dibandingkan karena pengukurannya tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Capaian kinerja IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup SDK Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

H. Kegiatan Pendukung

1. Rapat pemantauan tindak lanjut LHP BPK RI

Telah dilaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut LHP BPK RI Kepatuhan atas pengelolaan PNPB Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 serta Kinerja atas Efektivitas Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2025 pada KKP yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2026 di Ruang Rapat Profesional GMB III. Tujuan dilaksanakan rapat ini untuk memfasilitasi pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK RI atas dua laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yaitu Kepatuhan atas pengelolaan

PNBP Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 serta Kinerja atas Efektivitas Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2025 pada KKP. Pada rapat tersebut disampaikan rekapitulasi temuan untuk LHP Kepatuhan atas pengelolaan PNPB Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2025 yakni terdapat 8 temuan dengan 39 rekomendasi serta eselon 1 terkait (Ditjen PRL, Ditjen PT, Ditjen PSDKP, Ditjen PDSPKP, Ditjen PK dan Inspektorat Jenderal). Sedangkan rekapitulasi LHP Kinerja atas efektivitas kebijakan percepatan pembangunan Pergaraman Nasional Tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2025 dengan 8 temuan, 22 rekomendasi serta eselon 1 terkait yaitu Ditjen PRL, Ditjen PK, Sekretariat Jenderal (BLU LPMUKP) dan Ditjen PDSPKP. Dalam rangka juga membahas perkembangan tindaklanjut, rencana aksi penyelesaian, serta waktu pelaksanaan Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK untuk kedua LHP.



- I. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026
 - 1. Menindaklanjuti temuan LHP BPK

3.1.11. IKK 11 Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Sumber Daya Kelautan.

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Tidak ada capaian kinerja IKU Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2026 karena tidak ada target.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 pada IKK Nilai PM SAKIP lingkup Dit SDK (Nilai) tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 karena merupakan IKK baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

-

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional (Jika Ada)

-

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

-

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

G. Kegiatan Pendukung

-Pengumpulan data dukung penilaian PM SAKIP

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

1. Penilaian Mandiri SAKIP

3.1.12 IKK 12 Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)

Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- 3) Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- 4) Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026

Teknik Menghitung:

Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan sebagai berikut:

$$\text{Laporan SPIP}_{2026} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

dimana,

A_1 = Laporan SPIP Triwulan I 2026

A_2 = Laporan SPIP Triwulan II 2026

A_3 = Laporan SPIP Triwulan III 2026

A_4 = Laporan SPIP Triwulan IV 2026

Tabel 13. Capaian IKK Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 12	Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 2	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 2	Target TW 2	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
3 Dokumen	2 Dokumen	-1	100	2 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026
Capaian IKK Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK sebanyak 2 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%
Yang diperoleh dari penjumlahan capaian laporan SPIP di triwulan I 2026 ditambah capaian laporan SPIP di triwulan II 2026.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025
Capaian IKK Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK pada Triwulan II 2026 sebesar 2 dokumen. Sedangkan capaian triwulan II tahun 2025 sebanyak 1 dokumen. Hal menunjukkan bahwa capaian pada triwulan II 2026 lebih besar dibandingkan capaian TW 2 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana

D. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian target IKK ini adalah penyusunan laporan tepat waktu, tersedianya SDM yang memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan SPIP dan tersedianya data dukung penyusunan laporan secara lengkap dan tepat waktu.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

G. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target IKK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Triwulan II 2026 adalah pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan dan penyusunan laporan SPIP triwulanan.

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III 2026 adalah Direktorat Sumber Daya Kelautan adalah meningkatkan keaktifan dan kemampuan SDM yang bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan SPIP serta pemenuhan dokumen data dukung yang disyaratkan sehingga capaian setiap triwulannya dapat mencapai 100%.

3.13. IKM 13. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Teknik Menghitung:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/
- SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DI / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	25	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :
 - Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.
- ✓ Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Cukup Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	< 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	< 24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- ✓ Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{P3K} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan

➤ PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN
Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

Tabel 14. Capaian IKK Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)							
IKK - 13	Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)							
Tahun 2025	Tahun 2026						Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2025	Capaian TW 2	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 2	Target TW 2	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
85,83	83,3	0	108,18	77	108,18	81	84	99,2%

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Triwulan II adalah sebesar 83,30 dari target sebesar 77 atau sebesar 108,18%

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan capaian TW II Tahun 2026 yaitu sebesar 83,3 dengan TW II tahun 2025 yaitu sebesar 78, sehingga terjadi kenaikan sebesar 5,3.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025-2029 adalah sebesar 81 dengan capaian TW II sebesar 83,3 maka lebih tinggi sebesar 2,3.

E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian target IKK Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK adalah :

- a. Pengisian kinerja sudah menggunakan aplikasi SKP BKN online dan komitmen masing – masing pegawai dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dan Ditjen Pengelolaan Kelautan;
- b. Peningkatan kompetensi pegawai berjalan sesuai dengan jadwal melalui daring (online) maupun luring (offline) sehingga memungkinkan pegawai untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan/ Seminar melalui daring;
- c. Peningkatan disiplin disebabkan oleh tingkat kehadiran telah dilakukan

dengan menggunakan aplikasi presensi online dan tidak telah melakukan presensi

Kendala yang dihadapi pada IKK Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK adalah kurangnya kesadaran para pegawai lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk melaporkan bukti sertifikat pelatihan yang telah diikuti.

Solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong para pegawai Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan formal, mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring, memberikan perhatian terhadap reward and punishment untuk disiplin pegawai dan perlu dilakukan sosialisasi penginputan sertifikat pelatihan yang telah diikuti dalam aplikasi My ASN (BKN).

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui upaya mengikuti bimtek/pelatihan/ seminar melalui daring (online).

J. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam mendukung IKK IKK Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK antara lain :

- a. Melakukan ppresensi (kehadiran) pada saat datang di kantor dan pulang kantor melalui aplikasi e-presensi
- b. Mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar melalui daring (online) maupun luring (offline) pada bulan Januari hingga Juli 2026 baik yang diselenggarakan oleh internal Direktorat Sumber Daya Kelautan maupun pihak eksternal
- c. Penginputan target dan capaian Triwulan I dan Triwulan II tahun 2026
- d. Melakukan pengunggahan (upload) sertifikat bimtek/pelatihan/seminar yang telah diperoleh ke dalam aplikasi My ASN BKN.

K. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III 2026 adalah memotivasi para pegawai lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk mengikuti berbagai bimtek/pelatihan/seminar guna meningkatkan kompetensi dan kinerja; menginput e-kinerja BKN (SKP BKN) periode Triwulan III Tahun 2026; meningkatkan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar; serta menegakkan disiplin sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

3.14. IKM 14. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
2. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:
 - 1) Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
 - 2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Teknik Menghitung:

Nilai pengawasan kearsipan internal BPK Pontianak merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

- a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:
 - Sumber Daya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

$$NILAI = \sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 + \sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$$

$$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 = \text{Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek pengelolaan}$$

arsip dinamis.

- b_1 = Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis masing masing komponen subaspek 25%
- A_1 = Komponen-komponen atau subaspek yaitu : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.
- $\sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$ = Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek sumber daya kearsipan
- b_2 = Bobot pada 2 komponen atau sub aspek pada aspek sumber daya kearsipan Dimana bobot masing masing komponen 50%
- A_2 = Komponen-komponen atau subaspek yaitu : Sumber daya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
A	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
B	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
C	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 15. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)

SK-7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit SDK)	
IKK - 14	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)	
Tahun 2025	Tahun 2026	Renstra DJPK 2025-2029

Capaian 2025	Capaian TW 2	Kenaikan terhadap capaian 2025	% Capaian TW 2	Target TW II	% Capaian Target PK	Target PK 2026	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
94	-	-	-	-	-	81	-	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2026

Capaian IKM Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai) bersifat tahunan. Tidak ada target dan capaian IKK pada Triwulan II 2026. Namun kegiatan untuk mendukung IKK tersebut tetap dilakukan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK bersifat tahunan, sehingga tidak ada target dan capaian IKK pada Triwulan II 2026 dan Triwulan 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

D. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi

Faktor yang mendukung dalam pencapaian target IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan adalah komitmen pimpinan dan pegawai untuk menertibkan kearsipan di lingkungan Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Belum ditemukan adanya kendala atau permasalahan pada Triwulan II 2026. Solusi yang dilaksanakan jika terdapat kendala agar tetap mencapai target adalah dengan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait penyelesaian kearsipan lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1) Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komponen di bidangnya;
- 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun hybrid serta;
- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

G. Kegiatan Pendukung

1. Kegiatan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal

Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal untuk pengawasan kearsipan internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 dilaksanakan pada 2 April 2026. Dihadiri peserta Pejabat Fungsional Arsiparis dan Kepala Bagian Umum

pada Unit Kearsipan II, serta Pejabat Fungsional Arsiparis dan Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Kearsipan II

Pengawasan kearsipan internal merupakan bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan tertib arsip, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi kearsipan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Persiapan pengawasan dilakukan untuk menilai kesiapan unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan arsip, sekaligus mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat efektivitas tata kelola arsip.

Kegiatan Persiapan

- **Koordinasi Awal:** Rapat internal untuk menentukan ruang lingkup pengawasan.
- **Penyusunan Instrumen:** Menyusun checklist pengawasan kearsipan sesuai standar ANRI.
- **Inventarisasi Arsip:** Mengidentifikasi arsip aktif, inaktif, dan vital di setiap unit kerja.
- **Sosialisasi:** Memberikan arahan kepada unit kerja terkait persiapan dokumen.
- **Simulasi Pengawasan:** Uji coba instrumen pengawasan pada satu unit kerja sebagai pilot project.

Hasil Persiapan

- Instrumen pengawasan kearsipan internal telah disusun dan disepakati.
- Unit kerja telah menerima arahan dan daftar dokumen yang harus disiapkan.
- Pilot project simulasi pengawasan menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek pencatatan arsip elektronik.
- Jadwal pengawasan internal ditetapkan untuk periode Maret s.d Juni 2026.

Jadwal Pengawasan Kearsipan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

No	Uraian	Waktu
1	Penilaian Mandiri	17 Maret s.d 28 April 2026
2	Penyampaian from ASKE dan data dukung ke ANRI	29 April s.d 30 April 2026
3	Klasifikasi on desk exit meeting pengawasan kearsipan eksternal	19 Maret s.d 10 Juni 2026
4	Verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal	6 Juli s.d 20 Juli 2026
5	Penyampaian data dukung tambahan eksternal	Maksimal 31 Juli 2026

2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2026

Hasil Hasil Pengawasan Tahun 2025 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 sebesar 96,23 (sembilan puluh enam koma dua puluh tiga) kategori “AA (Sangat Memuaskan)” Tahun 2024 sebesar 95,23 (sembilan puluh lima koma dua puluh tiga) kategori “AA (sangat memuaskan)

Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 sebesar 94,91 (sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu) kategori “AA (Sangat Memuaskan)” Tahun 2024 sebesar 88,69 (delapan puluh delapan koma enam puluh Sembilan) kategori “A (memuaskan)”

Catatan Tim Pengawas ANRI

Kinerja yang harus DIPERTAHANKAN:

- Kebijakan kearsipan yang sebagian besar telah ditetapkan dan disosialisasikan terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya
- Pembinaan kearsipan yang diwujudkan dengan kapabilitas unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip vital
- Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh unit pengolah, penyampaian LAKI Konsolidasi, dan pemberian penghargaan kearsipan terhadap SDM dan unit pengolah
- Penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Pengendalian dan pengelolaan arsip inaktif dari seluruh unit pengolah, pemusnahan arsip sesuai prosedur dan rutin dilakukan

Catatan Tim Pengawas ANRI

- Penyempurnaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dengan memuat materi terkait penyelenggaraan SIKN-JIKN
- Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) baik untuk internal maupun eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penyerahan arsip statis ke ANRI yang mewakili seluruh fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Pelaksanaan alih media arsip sesuai ketentuan yang berlaku
- Penyelamatan arsip Covid-19 melalui penyerahan ke ANRI
- Sertifikasi serta peningkatan kompetensi arsiparis
- Pemenuhan kompetensi bagi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan

Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2026

1. Jadwal Pengawasan : 11 bulan (Januari-November) meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan
2. 2.Objek Pengawasan : seluruh unit Kearsipan (UK) II dan unit pengolah (UP) di Lingkungan KKP

Time Line Pengawasan Kearsipan Tahun 2026

- Self Assessment (17 Maret s.d. 28 April 2026)
- Penyampaian Form ASKE dan Data Dukung ke ANRI (29 s.d. 30 April 2026)
- Klarifikasi on desk dan exit meeting (19 Mei s.d. 10 Juni 2026)
- Verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal (6 s.d. 20 Juli 2026)

Time Line Pengawasan Kearsipan Tahun 2026

- PKPKT (6 April 2026)
- Self Assesment UK (April 2026)
- Self Assesment UP (Mei - Juni 2026)
- Verifikasi dan Klarifikasi Instrumen UK (April 2026)
- Verifikasi dan Klarifikasi Instrumen UK (Juni 2026)
- Pleno (Juli 2026)
- Penyusunan LAKI Konsolidasi (Juli s.d Agustus 2026)
- Penyampaian LAKI Konsolidasi kepada ANRI

KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL (OLEH ANRI KEPADA KKP)

Berdasarkan Form ASKE, bahan yang berasal dari aktifitas internal antara lain :

- Tata Naskah Dinas
- Penggunaan Kode Klasifikasi, Pemberkasan Arsip
- Pelaporan daftar arsip aktif
- Daftar arsip vital • Alih media arsip
- Pengelolaan SIKN/JIKN
- SDM yang mengelola arsip

PEMBOBOTAN PENILAIAN AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL UNIT PENGOLAH

NO	ASPEK/SUB ASPEK	BOBOT	
		ASPEK	SUB ASPEK
I	Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis		
	Sub Aspek Penciptaan Arsip		
	Sub Aspek Penggunaan Arsip		
	Sub Aspek Pemeliharaan Arsip		
	Sub Aspek Penyusutan Arsip		
II	Sub Aspek Sumber Daya Manusia Kerasipan		



3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Sumber Daya Kelautan hingga Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp.5.225.701.102 atau sebesar 0,46% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.135.699.373.000,- (setelah efisiensi).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026 terdapat 14 Indikator Kinerja (IKK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja Direktorat Sumberdaya memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2026 adalah sebesar 114,78 (Istimewa).
2. Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kegiatan, antara lain: kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2026

Terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Triwulan I tahun 2026 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Tindak lanjut rekomendasi Triwulan I Tahun 2026 dan telah ditindaklanjuti

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti
1.	Pemantauan Persiapan Kegiatan Ekstensifikasi Modelling Tambak Garam Rote Ndao dan Intensifikasi Tambak Garam Kawasan Pantai	Telah dilakukan pemantauan persiapan kegiatan ekstensifikasi modelling tambak garam Rote Ndao dan telah dinyatakan

	Utara Jawa Tahun 2025	Tuntas Data dukung tindak lanjut disampaikan pada link https://drive.google.com/file/d/1rOnFxz7K1RIYY-ZjqhePuzNvPxEgu9dT/view?usp=sharing
--	-----------------------	---

Terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Triwulan II tahun 2026 untuk ditindaklanjuti Triwulan III, yaitu :

Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi Triwulan II untuk diselesaikan hingga Triwulan III Tahun 2026

No	Rekomendasi
1.	Pembahasan rencana penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
2.	Pembahasan Anggaran PNBK 2026

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpki@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frista Yorhanita**
Jabatan : Direktur Sumber Daya Kelautan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Sumber Daya Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Frista Yorhanita

Lampiran 1. Lanjutan Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan 2026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi petambak garam	1.	Korporasi petambak garam yang dikembangkan (kumulatif) (Lembaga)	3
2.	Meningkatnya kompetensi petambak garam	2.	Petambak garam yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	100
3.	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	3.	Luas lahan garam yang direvitalisasi (Ha)	1.500
4.	Meningkatnya pengembangan kawasan sentra ekonomi garam	4.	Kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan) (kumulatif)	1
5.	Meningkatnya usaha kelautan berkelanjutan	5.	Volume pengelolaan hasil sedimentasi (Juta m ³)	500
		6.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1
		7.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1
6.	Meningkatnya perizinan berusaha sumber daya kelautan	8.	Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumber daya kelautan (%)	100
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dit. SDK)	9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Dit. SDK (%)	81
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Dit. SDK (%)	100
		11.	Nilai PM SAKIP lingkup Dit. SDK (Nilai)	72
		12.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. SDK (Dokumen)	4
		13.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Dit. SDK (Indeks)	81
		14.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Dit. SDK (Nilai)	81

Lampiran 1. Lanjutan Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan 2026

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.201.500.000.000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	1.300.000.000
Total Anggaran Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2026		1.202.800.000.000

Jakarta, 26 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Sumber Daya Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Frista Yorhanita



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL dirjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026 14 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2026

Yth. 1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katimja Program, Setditjen PK
di Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 955/TJ.0/TU.140/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2026, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang terbit Triwulan IV s/d periode Triwulan I Tahun 2026 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2026 lingkup Ditjen PK sebesar 91,33%.
3. Rincian perkembangan capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen per 10 Juli 2026 dengan 115 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti (tuntas) dengan 105 rekomendasi nilai dan status sisa temuan sebanyak 10 saran/rekomendasi.
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke III Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mitahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Lampiran

Nomor : B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU

"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2026

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah/Rp)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	31	25	82	6	0,2	98
2	Dit. KE	15	15	100	0	0	100
3	Dit. P3K	20	15	75	5	0,2	96
4	Dit. Jasbar	11	11	100	0	0	100
5	Dit. SDK	4	3	75	1	0,2	95
6	Dit. KSG	3	3	100	0	0	100
7	BPK Kupang	2	2	100	0	0	100
8	BPK Pontianak	0	0	100	0	0	100
9	BPK Denpasar	15	15	100	0	0	100
10	LPK Pekanbaru	15	15	100	0	0	100
Jumlah							91,33

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL dirjenppa@kkp.go.id

Nomor : B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026 14 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2026

Yth. 1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katinja Program, Selditjen PK
di Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2026, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang terbit Triwulan IV s/d periode Triwulan I Tahun 2026 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2026 lingkup Ditjen PK sebesar 91,33%.
3. Rincian perkembangan capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen per 10 Juli 2026 dengan 115 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti (tuntas) dengan 105 rekomendasi nilai dan status sisa temuan sebanyak 10 saran/rekomendasi.
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke III Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Lampiran

Nomor : B.2380/DJPK.1/TU.210/VII/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2026

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah/Rp)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	31	25	82	6	0,2	98
2	Dit. KE	14	12	85	2	0,1	95
3	Dit. P3K	20	15	75	5	0,2	96
4	Dit. Jasbar	11	11	100	0	0	100
5	Dit. SDK	4	3	75	1	0,2	95
6	Dit. KSG	3	3	100	0	0	100
7	BPK Kupang	2	2	100	0	0	100
8	BPK Pontianak	0	0	100	0	0	100
9	BPK Denpasar	15	15	100	0	0	100
10	LPK Pekanbaru	15	15	100	0	0	90
Jumlah							91,33

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjen@kkp.go.id

Nomor : B.2378/DJPK.1/TU.140/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2026 lingkup
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

13 Juli 2026

Yth. 1. Direktur lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
2. Kepala UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
Di Tempat

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor: 1209/SJ.3/TU.140/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Semester I Tahun 2026 dan Target Capaian IP ASN KKP Semester II Tahun 2026, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran pada Dashboard IP ASN KKP per tanggal 10 Juli 2026, nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2026, yaitu sebesar **83,19** (kategori tinggi) terdiri dari :
 - a. Kualifikasi sebesar 22,57;
 - b. Kompetensi sebesar 30,08;
 - c. Kinerja sebesar 25,53;
 - d. Disiplin sebesar 5.
2. Prosentase hasil diatas sebesar **108,03%** melebihi target Semester I Tahun 2025 sebesar 77 (kategori sedang), sehingga capaian seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah tercapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan di awal tahun (rekap terlampir).
3. Target tahunan nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tahun 2026 telah ditetapkan, untuk **Semester I** sebesar 77 dan **Semester II** sebesar 80. Berkaitan dengan hal tersebut kiranya Saudara dapat mendorong para pegawai untuk melakukan peningkatan pada dimensi Kualifikasi, Kinerja, Disiplin dan Kompetensi terutama komponen Diklat 20 JP (PNS) dan 24 JP (PPPK) baik yang diselenggarakan oleh internal KKP maupun diluar instansi yang sifatnya menunjang tugas fungsi pegawai.
4. Analisis dan Rekomendasi atas Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP Tahun 2026 dapat dilihat pada nota dinas terlampir.

5. Upaya Optimalisasi pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2026 dan menghindari trafik sinkronisasi data di akhir penutupan pada tanggal 31 Desember 2026, Saudara dapat menugaskan pengelola data kepegawaian, sebagai berikut :
- a. monitoring dan mengingatkan seluruh pegawai di unit organisasinya untuk mengupdate data pendidikan bagi pegawai yang sudah pencantuman gelar dan pelatihan pimpinan bagi pejabat struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, diklat Fungsional bagi pejabat fungsional ahli dan terampil baik PNS dan PPPK, diklat teknis dan diklat 20 JP bagi PNS dan diklat 24 JP bagi PPPK;
 - b. melakukan updating data penjatuhan hukuman disiplin pada aplikasi i-dis dan data riwayat hukuman disiplin SIASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 - c. melakukan pendataan dan melaporkan ke kami, siapa saja ASN yang tidak memiliki predikat SKP tahun terakhir;
 - d. updating data pencantuman gelar bagi ASN yang sudah memiliki ijazah pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIASN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Lampiran Surat
 Nomor : B.2378/DJPK.1/TU.140/VII/2026
 Tanggal : 13 Juli 2026

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2026**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,08	29,75	25,77	5	83,59
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,68	30,54	26,07	5	84,29
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,75	30,18	25,28	5	84,21
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,78	28,6	26,33	5	83,7
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,48	26,69	25,15	5	80,33
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23,3	29,1	25,91	5	83,3
7.	Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak	21,73	32,79	25	5	84,52
8.	Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar	21,88	29,51	25,19	5	81,59
9.	Balai Pengelolaan Kelautan Kupang	21,61	31,27	24,27	5	82,16
10.	Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru	21,93	31,18	26,27	5	84,38
11.	Balai Besar Produksi Garam Kupang	25	23,75	28,75	5	82,5

Keterangan :
 Nilai diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada laman Portal KKP aplikasi Portal Pegawai menu IP ASN.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Miftahul Huda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Saadit Negeri

sebelumnya) dihitung 2 (dua) kali, pada dimensi Kinerja (bobot 30) dan pada dimensi Kompetensi, predikat SKP mendapatkan bobot 25, sehingga apabila seorang ASN mendapatkan predikat SKP Sangat Baik, IP ASN sudah mendapatkan nilai 55. Hal ini menjadi rekomendasi agar para pengelola SKP, pengelola data pegawai atau IP ASN, sebagai berikut:

- 1) selalu monitoring nilai predikat SKP seluruh pegawainya, apakah predikat SKP di aplikasi eKinerja BKN sudah sinkronisasi ke aplikasi SIASN BKN;
 - 2) input data riwayat kinerja di aplikasi SIASN apabila terdapat pegawai mutasi dari luar KKP yang belum menggunakan aplikasi eKinerja BKN;
 - 3) bagi pegawai yang tidak menyusun perencanaan SKP, tidak mengisi rencana aksi, mengisi bukti dukung, mengisi realisasi dan dinilai SKP nya oleh Pimpinan Organisasi wajib di monitoring dan dilakukan penilaian SKP untuk menghindari adanya disparitas data kinerja pada aplikasi SIASN.
- b. Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25 dengan melihat level jabatan (struktural, Fungsional Ahli dan Terampil, dan pelaksana) yang memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya monitoring dari pengelola data SIASN untuk verifikasi data jabatan terakhir dan data riwayat pendidikan, saat ini seluruh ASN di lingkungan KKP dapat melihat kondisi data profile pribadi dan data riwayat pribadinya serta kelengkapan data dokumen elektronik pada Portal Pegawai di aplikasi Portal KKP.
- c. Peningkatan dimensi Kompetensi dengan pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) jabatan struktural mengikuti diklat pimpinan atau pelatihan manajerial sesuai level eselon dengan bobot 10;
 - 2) jabatan fungsional mengikuti diklat fungsional dengan bobot 10;
 - 3) jabatan pelaksana atau staf mengikuti diklat teknis dengan bobot 10;
 - 4) seluruh jabatan mengikuti diklat minimal 20 Jam Pelatihan (JP) untuk PNS dan 24 JP untuk PPPK dengan bobot 5.
4. Upaya Optimalisasi pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2026 dan menghindari trafik sinkronisasi data di akhir penutupan pada tanggal 31 Desember 2026, Saudara dapat menugaskan pengelola data kepegawaian, sebagai berikut:
- a. monitoring dan mengingatkan seluruh pegawai di unit organisasinya untuk mengupdate data pendidikan bagi pegawai yang sudah pencantuman gelar dan pelatihan pimpinan bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III,

dan Eselon IV, diklat Fungsional bagi pejabat fungsional ahli dan terampil baik PNS dan PPPK, diklat teknis dan diklat 20 JP bagi PNS dan diklat 24 JP bagi PPPK,

- b. melakukan updating data penjatuhan hukuman disiplin pada aplikasi i-dis dan data riwayat hukuman disiplin SIASN di lingkungan KKP;
- c. melakukan pendataan dan melaporkan ke kami, siapa saja ASN yang tidak memiliki predikat SKP tahun terakhir;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran

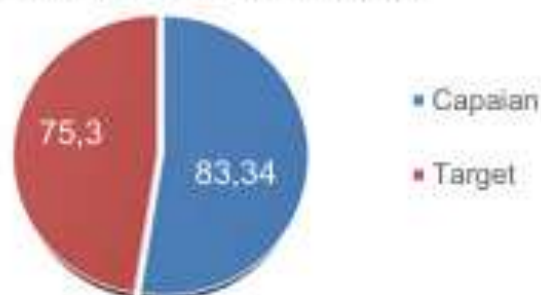
Nomor : 1209/SJ.3/TU.140/VII/2026

Tanggal : 10 Juli 2026

1. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Tahun 2026 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No.	Unit	Semester I			Semester II	
		Capaian	Target	Prosentase (%)	Periode Pengukuran	Target
1	Sejen	85,23	75	113,64	Semesteran	82
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	84,03	77	109,12	Semesteran	80
3	Ditjen Pengelolaan Kelautan	83,19	77	108,03	Semesteran	80
4	Ditjen Perikanan Tangkap	84,36	77	109,55	Semesteran	84
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	81,8	74	110,54	Semesteran	81
6	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	84,22	74	113,81	Semesteran	81
7	Ditjen PSDKP	85,81	74	115,95	Semesteran	81
8	Inspektorat Jenderal	86,23	76	113,46	Semesteran	83
9	BPPSDMKP	82,5	74	111,48	Semesteran	81
10	BPPMHKP	82,34	75	109,78	Semesteran	82
	IPASN KKP	83,34 (Tinggi)	75,3 (Sedang)	110,67	Semesteran	82 (Tinggi)

Capaian IP ASN KKP Semester I Tahun 2026



Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara

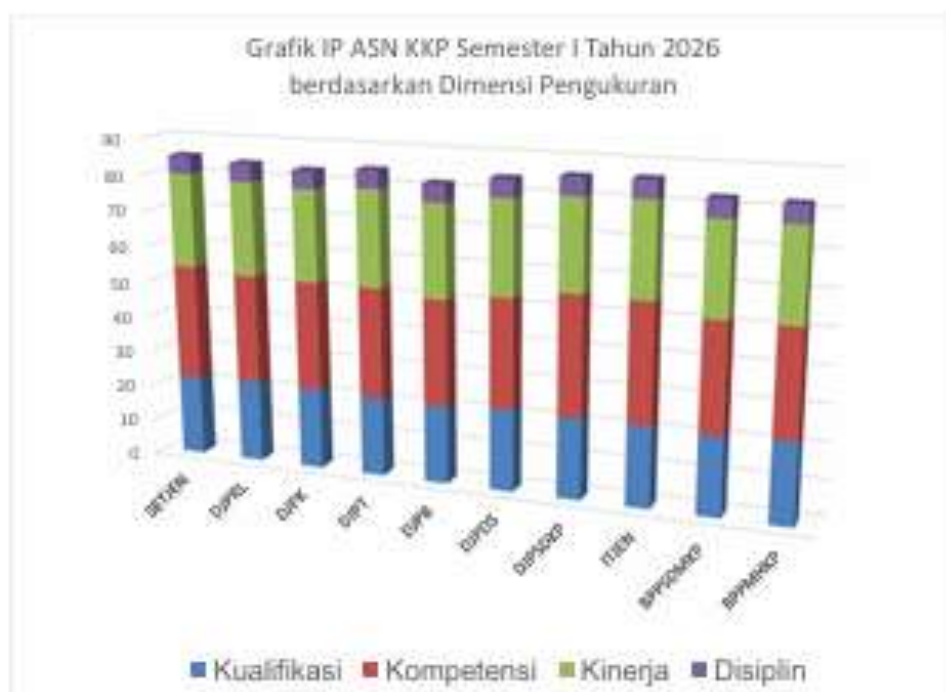


2. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester I Tahun 2026 berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	22,26	31,95	26,01	5	85,23
2	Dijen Pengelolaan Ruang Laut	22,77	30,29	25,98	5	84,03
3	Dijen Pengelolaan Kelautan	22,57	30,08	25,53	5	83,19
4	Dijen Perikanan Tangkap	21,89	30,74	26,74	5	84,36
5	Dijen Perikanan Budi Daya	21,68	29,31	25,81	5	81,8
6	Dijen Penguatan Daya Saing Produk KP	22,91	30,21	26,11	5	84,22
7	Dijen PSDKP	22,44	33,21	25,16	5	85,81
8	Inspektorat Jenderal	22,48	32,94	25,82	5	86,23
9	BPPSDMKP	21,99	30,13	25,39	5	82,5
10	BPPMHP	22,59	29,64	25,12	4,99	82,34
	Total	22,13	30,58	25,63	5	83,34 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah ASN yang dihitung sesuai ketentuan sebesar 15.178 ASN KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS serta PPPK tahun terakhir. Data terakhir diambil pada tanggal 10 Juli 2026. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman aplikasi Portal Pegawai menu Portal Pegawai.



3. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkup Setjen Semester I Tahun 2026 berdasarkan Unit Kerja Eselon II dan Dimensi Pengukuran

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Staf Ahli Menteri	25	30	30	5	90
2	Biro Perencanaan	23,12	33,32	26,96	5	88,41
3	Biro Keuangan	22,93	31,27	25,69	5	84,89
4	Biro SDMAO	21,93	33,22	26,53	5	86,88
5	Biro Hukum	22,11	30,6	27,33	5	85,04
6	Biro HKLN	22,24	28,9	26,47	5	82,61
7	Biro Umum	22,35	34,94	25,48	5	87,76
8	Biro PBJ	21,54	34,01	26,3	5	86,85
9	Pusdatin	22,07	29,6	25,27	5	81,94
10	BPISKP	21,81	25,8	24,57	5	77,18
11	Puskajis	25	32,97	28,89	5	91,86
	Total	22,26	31,95	26,01	5	85,23 (Tinggi)

Keterangan:

Jumlah Database sebesar 670 ASN lingkup Setjen, tanpa data BP Batam dan CPNS serta PPPK tahun terakhir. Data terakhir diambil pada tanggal 10 Juli 2026. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman aplikasi Portal Pegawai menu Portal Pegawai.

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara



4. Metode Pengukuran IP ASN (PIP ASN)
Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

a) Kualifikasi bobot nilai 25

Dimensi	Jabatan	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh Pegawai (Bobot)					
				S3	S2	SI/Div	DIII	DII/IV/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ Div	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI/ Div	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ Div	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

b) Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi		
I	Nilai Kinerja			
	Sangat Baik	25		
	Baik	20		
	Butuh Perbaikan	15		
	Kurang	10		
	Sangat Kurang	5		
II	Diklat Struktural	Struktural	Fungsional	Pelaksana
	Pernah ikut Diklat Pim pada levelnya	10	-	-
	Tidak Pernah ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
III	Diklat Fungsional			
	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	10	-
	Tidak Pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
IV	Diklat Teknis			
	Pernah ikut Diklat Teknis	-	-	10
	Tidak Pernah ikut Diklat Teknis	-	-	0
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	5	5	5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

c) Kinerja (Nilai SKP tahun sebelumnya) bobot nilai 30

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

d) Disiplin (riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir), bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara